

Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kesadaran Politik Mahasiswa

Adli Amri Fauzy¹, Itsna Rizqillah², Aulia Khairish Febriani³, Filky Putra Herwandi⁴,
Supriyono⁵

^{1,2,3,4} Manajemen Industri Katering, Universitas Pendidikan Indonesia

⁵ Pendidikan dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail: aamrifauzy@upi.edu

Abstrak

Pendidikan kewarganegaraan (PKN) merupakan basis penting bagi mahasiswa untuk memahami dinamika politik saat ini. Namun, pemahaman pada mata kuliah PKN perlu dibersamai dengan kesadaran politik yang tinggi. Melalui penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini, penulis mendeskripsikan pandangan mahasiswa di masa kini terkait politik, serta faktor apa yang menunjukkan pentingnya PKN dalam membentuk pandangan tersebut. Ditemukan bahwa perlu adanya pembaruan dalam mata kuliah PKN untuk menyesuaikan kerangka teoretis dengan perkembangan politik saat ini, serta partisipasi aktif mahasiswa dalam berpolitik. PKN hendaknya menyadarkan mahasiswa mengenai hak dan kewajiban dalam berpolitik, sehingga kesadaran politik dapat terbentuk secara ideal.

Kata kunci : *Pendidikan Kewarganegaraan, Kesadaran Politik, Mahasiswa.*

Abstract

Civic education (PKN) is an important basis for students to understand current political dynamics. However, understanding PKN needs to be balanced with high political awareness. Through this qualitative-based research, the author describes students' current views on politics, as well as what factors indicate the importance of PKN in forming these views. It is found that there needs to be an update in the PKN curriculum to adjust the theoretical framework to current political developments, as well as active student participation in politics. PKN should make students aware of their rights and obligations in politics, so that political awareness can be formed ideally.

Keywords : *Civic Education, Political Awareness, Students*

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan dalam bahasa latin disebut *civicus*, kemudian dimodifikasi kedalam bahasa inggris menjadi *civic* yang berarti warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata *civic*, muncul kata *Civic education* yang mengacu pada ilmu kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan. Di Indonesia istilah pendidikan telah muncul sejak era penjajahan Belanda yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai hak dan tanggung jawab kewarganegaraan, sehingga individu dapat menjadi warga negara yang teliti juga kritis dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.

Di Indonesia pelajaran *civicus* atau kewarganegaraan telah ada sejak zaman kolonial Belanda dengan sebutan *Burgerkunde*. Pendidikan kewarganegaraan (PKN) mencakup nilai-nilai mengenai hak dan kewajiban kewarganegaraan, yang ditujukan kepada seluruh warga negara untuk mendorong semua warga menjadi pribadi yang peduli dan kritis dalam berpartisipasi di kehidupan sosial dan berbangsa.

Untuk membangun sebuah masyarakat yang adil dan bertanggung jawab, pendidikan kewarganegaraan sangat penting. Diperguruan tinggi negeri pendidikan kewarganegaraan sangat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, terutama dalam berbagai tantangan sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi oleh

masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya melibatkan aspek akademik, tetapi juga dalam pengembangan sikap, nilai-nilai, dan keterampilan sosial.

Mahasiswa mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menentukan arah bangsa supaya berjalan dan berperan sebagai jembatan rakyat untuk menuju pusat kemajuan bangsa. Mahasiswa disebut *Agent of Change* karena berperan penting dalam proses perubahan. *Agent of Change* merupakan istilah kata motivasi yang ditujukan untuk mendorong ke arah yang lebih baik (Sofyan, 2014). *Agent of Change* merupakan sebuah kelompok individu yang menerima perhatian dan harapan masyarakat untuk dapat menjalankan dan memimpin sistem sosial (Ayu Luhuan, 2014).

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban ditengah berbagai macam tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dalam hal literasi politik, perspektif kritis dan keterlibatan warga negara sangat penting karena literasi politik itu mencakup pada pemahaman warga negara tentang segala hal yang berkaitan dengan proses masalah, isu-isu politik serta kewajiban untuk berperan aktif disetiap kegiatan politik.

Mahasiswa sebagai generasi penerus dan penggerak perubahan harus mampu mempersiapkan diri untuk melakukan tugas yang diberikan kepada mereka sebagai penggerak. Generasi muda tidak hanya harus taat pada hukum, tetapi juga harus memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dan lebih siap dalam menghadapi persaingan. Salah satu cara yang paling efektif untuk menumbuhkan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab seseorang, serta semua keterampilan yang diharapkan adalah melalui pendidikan.

Menurut kompas.com, jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya pada pemilu 2019 hanya mencapai 158.012.506 dari total 199.987.870. Artinya, ada sekitar 41.975.364 pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya. Berdasarkan laporan CNN, lebih dari 40 persen kelompok milenial diperkirakan tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019. Hal ini mencerminkan bahwa masih banyak generasi muda, termasuk mahasiswa yang belum berpartisipasi dalam politik saat itu. Padahal, sebagai generasi muda harusnya berpesan sebagai contoh dan penggerak bangsa.

Saat ini, kesadaran politik mahasiswa dianggap minim, sehingga banyak mahasiswa yang tidak terlibat dalam berpartisipasi didalam politik dan bela negara (Anggreani et al, 2022). Hal ini terlihat dari beberapa fakta mahasiswa yang masih kurang peduli terhadap politik pengembangan mahasiswa di Indonesia. Dari sebagian mahasiswa mereka tetap apatis dan enggan berpartisipasi dalam politik, seperti menggunakan hak pilihnya dalam pemilu pilkada. Banyak dari mereka yang tidak peduli ataupun memilih suara karena kurangnya perhatian terhadap masa depan negara. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi dinegara, sikap tidak peduli harus dikurangi. Menurut Hanayono & Lestari (2017), pendidikan merupakan upaya yang disengaja dan efisien untuk membentuk individu yang berkarakter politik, sehingga mempunyai kesadaran politik dan mampu bertanggung jawab secara moral dalam mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara (Rahman & Sukarno, 2011).

Pendidikan politik merupakan jenis pendidikan yang dirancang secara sengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar lebih efektif dan aktif terlibat dalam perjuangan politik serta memiliki tanggung jawab etis tinggi dalam setiap aktivitas politiknya (Sukarno, 2011). Masyarakat membutuhkan pendidikan politik guna mencapai berbagai tujuan sosial-ekonomi dan politik tertentu, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta dapat berpartisipasi secara politik (Sukarno, 2011).

Pendidikan politik penting diberikan agar generasi muda memiliki pemahaman yang benar tentang politik dan terhindar dari kesalahpahaman (Rahman & Suharno, 2019). Rahman dan Suharno (2019) mengutip Sastroatmodjo (1995) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran politiknya. Menurut Wuryan & Syaifullah (2008), pendidikan politik berperan penting dalam membangun kesadaran warga negara sehingga mereka mampu berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat (Rahman & Suharno, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa penting peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kesadaran politik pada mahasiswa dan mendorong generasi muda agar aktif berpartisipasi dalam politik.

METODE

Dilihat dari jenis data yang di ambil, pendekatan ini menggunakan metode yang disebut kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian ini adalah penelitian yang mengusung pada kualitas atau hal-hal yang bersifat sangat penting dari suatu hal. Hal tersebut bisa berupa fenomena/gejala, sosial/kejadian yang bermakna dibalik hal tersebut dapat dijadikan pembelajaran berharga untuk suatu konsep teori.

Dengan penggunaan metode ini dapat memberikan solusi untuk penelitian yang membutuhkan pemahaman secara lebih detail dan mencangkup objek objek yang diteliti sehingga menghasilkan rangkuman penelitian dalam konteks waktu dan situasi yang terkait, metode instrumen yang dipakai adalah instrumen wawancara, instrumen ini digunakan untuk mencari informasi tentang peran pendidikan kewarganegaraan terhadap kesadaran politik mahasiswa. Teknik mencari dan mengolah data adalah langkah paling utama di dalam penelitian, dikarekan tujuannya adalah mendapatkan data. Ada dua macam teknik untuk pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara.

Studi kepustakaan merupakan tahap mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis dan para literatur. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapat informasi teoritis sehingga para peneliti memiliki landasan yang valid sebagai suatu hasil ilmiah. Data penelitian berasal dari buku dan jurnal yang relevan untuk diteliti oleh para literatur. Analisis data yang digunakan ini merupakan data kuantitatif, yang dimana penelitian ini berupa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli terkait pendidikan kewarganegaraan dan juga kesadaran berpolitik. Data yang diambil digunakan sebagai dasar memperkuat argumen para literatur untuk menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan terhadap politik dilingkungan mahasiswa.

Menurut Sugiyono (2016:194), wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi awal untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti atau ketika peneliti ingin memperoleh informasi yang lebih mendalam dari responden. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan sebelumnya. Selama wawancara, tidak ada tambahan pertanyaan baru, yang mungkin membatasi informasi yang diperoleh. Wawancara ini dilakukan secara online dengan 15 narasumber yang memiliki latar belakang yang beragam.

Penelitian dilaksanakan di Universitas Pendidikan Indonesia yang terletak di Jl. Dr. Setiabudi No.229, Kel. Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat.

Tabel Data Narasumber

No.	Nama	Keterangan
1.	RG	Prodi Akuntansi_ Universitas Airlangga
2.	FIM	Prodi Pendidikan Masyarakat_ Universitas Pendidikan Indonesia
3.	TLD	Prodi Akuakultur_ Universitas Airlangga
4.	FA	Prodi Sosiologi _ Universitas Airlangga
5.	DFP	Prodi Manajemen Industri Katering_ Universitas Pendidikan Indonesia
6.	HAA	Prodi Ilmu dan Teknologi Kelautan_ Institut Pertanian Bogor
7.	RRA	Prodi Manajemen Resort and Leisure_ Universitas Pendidikan Indonesia
8.	KMN	Prodi Ilmu Komunikasi_ UIN Sunan Gunung Djati
9.	ANB	Prodi Sosiologi_ Universitas Airlangga
10.	SR	Prodi Hukum_ Iniversitas Islam Yogyakarta
11.	SA	Prodi Ekonomi Syariah_ Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin Jakarta
12.	EM	Prodi Bahasa Inggris_ Politeknik Negeri Jakarta
13.	EH	Prodi Manajemen _ Universitas Islam 45 bekasi
14.	ABS	Prodi Ilmu Hukum_ Universitas Pendidikan Indonesia
15.	AFA	Prodi Manajemen Industri Katering_ Universitas Pendidikan Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh terhadap lima belas orang dari kalangan mahasiswa dengan latar belakang Pendidikan yang berbeda terkait Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kesadaran Politik Mahasiswa, diperoleh informasi yang menunjukkan adanya pengaruh yang beragam yang dirasakan oleh para mahasiswa yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tenaga pendidik, cara pembelajaran, materi yang disampaikan dan implementasi Di bawah ini adalah penjelasan dan jawaban dari kedua pertanyaan yang telah kami persiapkan untuk para narasumber.

1. Bagaimana kurikulum PKN di perguruan tinggi mempengaruhi pemahaman mahasiswa tentang sistem politik di Indonesia? Apakah berdampak besar?

Tanggapan Narasumber
<p>Berdasarkan dari hasil wawancara kami pada seluruh narasumber, hasilnya adalah mayoritas mahasiswa mengatakan pembelajaran pkn dalam perguruan tinggi ini cukup berdampak terhadap sistem pola pikir kritis mahasiswa. Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap pemahaman politik mahasiswa, hal ini jelas akan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa dalam menyikapi segala kebijakan yang ada. Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi pun bisa menjadi pembuka jalan untuk para mahasiswa mengenal Indonesia yang lebih kompleks. Adapun narasumber yang mengatakan Pendidikan Kewarganegaraan ini hanya berdampak kecil dalam mempengaruhi pemahaman tentang sistem politik mahasiswa, seperti mahasiswa nomor 2 dan 8 hal itu dikarenakan oleh aspek tenaga pendidik yang kurang maksimal dalam menyampaikan materi ataupun materi yang tergolong masih terlalu universal dan teoritis untuk dipelajari sehingga mahasiswa tidak paham dan akhirnya masih banyak mahasiswa yang tidak teredukasi dan tutup telinga perihal keadaan politik di negara ini. Dengan adanya pemahaman ini kita berharap sistem politik di Indonesia menjadi pengaruh yang baik oleh sebagian besar mahasiswa perguruan tinggi dan para pengajar pun bisa ikut membantu pengajaran terkait pola pikir mahasiswa yang kurang maksimal.</p>

2. Bagaimana PKN dapat membantu mahasiswa mengembangkan sikap kritis terhadap isu-isu politik dan sosial yang terjadi di masyarakat?

Tanggapan narasumber
<p>Ketika diwawancarai tentang Sinergi Pendidikan kewarganegaraan dalam membantu mahasiswa mengembangkan sikap kritis terhadap isu-isu politik dan sosial yang terjadi masyarakat, mayoritas narasumber mengatakan bahwa pembelajaran berbasis diskusi berkelompok yang memberikan kesempatan para mahasiswa untuk mengimplementasikan hak dan kewajiban akan sangat membantu mahasiswa. Narasumber lain mengatakan bahwa pembelajaran dengan forum debat terkait isu-isu factual yang sedang terjadi seperti masalah Demokrasi, Diskriminasi, Hak Asasi Manusia, ataupun Korupsi saat itu akan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis terkait dampak apa saja yang akan dirasakan oleh Masyarakat.</p> <p>Berdasarkan opini Mahasiswa 7, mahasiswa akan lebih terbantu dengan penugasan PKN yang berbasis pada pembuatan artikel, karena menurut mahasiswa 7, mahasiswa akan banyak lebih membaca dan mencari tahu sebanyak mungkin. Selain itu, mahasiswa 7 juga menambahkan, Penugasan artikel berkelompok akan sangat membantu mahasiswa untuk bisa berdiskusi nonformal terkait isu yang ada, mahasiswa 7 juga mengharapkan terbentuknya jiwa kepemimpinan melalui diskusi kelompok.</p>

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan dampak bagi Mahasiswa dalam Memahami Politik di Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan pemahaman mahasiswa mengenai politik dan isu-isu sosial yang terjadi

di Indonesia. PKN tidak hanya sekedar memberikan materi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan kesadaran politik yang kritis dan aktif.

Namun, jika PKN hanya disampaikan dalam bentuk materi teoritis tanpa mengaitkannya dengan isu-isu politik terkini, dampaknya terhadap pengetahuan mahasiswa akan menjadi sangat terbatas. Mahasiswa mungkin memahami konsep dasar, tetapi belum tentu mampu mengaplikasikan dalam konteks yang relevan dan aktual di dunia nyata.

Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif harus bisa mengaitkan antara teori dengan praktik, terutama dalam konteks isu politik yang sedang berkembang. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya menerima sebuah informasi, melainkan sebagai pelaku dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Hak suara dan kewajiban mahasiswa di dalam perpolitikan memiliki peranan yang sangat penting. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa tidak hanya memiliki hak untuk memilih, tetapi juga memiliki hak untuk berkontribusi dalam menentukan pembangunan dan kebijakan di negara. Mahasiswa dalam dunia perpolitikan sangat penting agar bisa menciptakan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Dengan memahami dan menjalankan kedua aspek itu, mahasiswa tidak hanya ikut serta dalam pemilihan pemimpin, tetapi juga dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik di masa depan. Ke ikut sertaan mahasiswa dalam politik merupakan kunci bahwa suara mereka didengar dan aspirasi mereka bisa terwujud dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Pentingnya mengaitkan kurikulum PKN dengan isu masa kini, salah satunya adalah Dalam Konteks Realita, isu-isu politik seperti pemilihan umum, korupsi. Jika dikaitkan dengan PKN isu itu membantu mahasiswa melihat relevansi atau tidaknya dari apa yang di pelajari. Keterlibatan mahasiswa, dengan memahami isu-isu yang sedang booming, mahasiswa akan lebih terdorong terlibat dalam diskusi, debat, dan kegiatan sosial lainnya. Ini sangat penting karena membentuk individu yang tidak hanya paham teori, tetapi juga bisa berkontribusi di dalam masyarakat.

Diskusi tentang isu politik dapat mengasah kemampuan mahasiswa untuk berpikir lebih kritis. Mahasiswa belajar untuk menganalisis sebuah informasi, juga memahami sudut pandang yang berbeda, dan bisa mengevaluasi dampak dari kebijakan atau keputusan yang diputuskan. Pengaitan kurikulum PKN dengan isu terkini salah satunya, Pemilu dan Partisipasi Politik, banyak diskusi mengenai pentingnya suara mahasiswa di dalam pemilihan umum, serta banyak juga generasi muda yang menganalisis isu-isu politik agar tegaknya suatu kebijakan.

Ada juga hak yang bisa di dapatkan oleh mahasiswa khususnya dalam sistem perpolitikan, salah satunya menentukan pemimpin dan bisa menyuarakan aspirasi. Menentukan pemimpin dengan melakukan pemilihan umum agar bisa memilih pemimpin mana yang bisa mewakili aspirasi. Menyuarakan aspirasi, sangat penting untuk mengekspresikan padangan dan harapan rakyat terhadap pemimpin.

Pendidikan kewarganegaraan yaitu sarana pengajaran perihal mengindonesia mahasiswa secara berakal, cerdas dan penuh tanggung jawab (Abdul Aziz Wahab, 2021:14). Pendidikan kewarganegaraan lebih spesifik mengkaji ke arah pemerintahan, konstitusi, demokrasi, mengatur hukum, hak asasi, serta hak dan kewajiban warga negara (Azyumardi Azra, 2021:3)

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang dapat membentuk pandangan demokratis mahasiswa dan melalui mata pelajaran ini, para pengajar berupaya membentuk sikap mahasiswa dengan menanamkan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kesadaran politik mereka. Oleh karena perlu, ditanamkan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan mengingat tidak hanya mengajarkan untuk memahami politik ini, tetapi juga mengetahui bagaimana menerapkannya dalam sebuah tindakan politik (Santika, Purnawijaya, & Sujana, 2019).

Berdasarkan hal ini peran pendidikan kewarganegaraan harus diintegrasikan untuk memperkenalkan dan memahami partisipasi politik baik secara teori maupun terlibat dalam praktik politik yang berlangsung serta bertanggung jawab dilingkungan mereka sendiri. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pondasi dalam pengembangan pemahaman mahasiswa terhadap partisipasi politik sesungguhnya dan bisa dilihat dari capaian kualifikasi pengetahuan kewarganegaraannya (Civic Knowledge), sikap kewarganegaraannya (Civic Disposition) ,

keterampilan kewarganegaraan (Civic Skills) dalam partisipasi politik yang bertanggung jawab dan berkualitas. Hal ini bertujuan untuk mahasiswa bisa memilih dalam pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya pada kehidupan politik dan lingkungan sekitar. Dengan adanya pendidikan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menetapkan pandangan politik, sehingga bisa memiliki sikap bela negara.

Peran serta tanggung jawab warga negara yang berkualitas dalam kehidupan politik merupakan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Untuk mencapai peran tersebut diperlukan kompetensi kewarganegaraan yang terdiri dari (1). Perolehan pengetahuan, (2). Pengembangan keterampilan intelektual dan partisipatif, dan (3). Pengembangan karakter (Wulandari, & Dayat 2020).

SIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan berpengaruh cukup besar terhadap kesadaran politik mahasiswa. Kurikulum dan pengajaran yang diberikan oleh Pendidikan Kewarganegaraan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk dapat di implementasikan oleh mahasiswa. Tapi terkadang PKN ini sendiri kurang di maknai oleh sebagian mahasiswa yang menyebabkan kurangnya kesadaran politik. Penyebabnya adalah beberapa pengajar ataupun materi yang diberikan terlalu satu arah dan terkesan kurang kooperatif. Akan tetapi Pendidikan Kewarganegaraan tetap memiliki peran yang besar dalam membangun Kesadaran Politik pada mahasiswa. Kesadaran Politik dapat tumbuh ketika mahasiswa tertarik dan peduli dengan materi yang berkesinambungan dalam Pendidikan Kewarganegaraan seperti ruang diskusi dan penyampaian aspirasi dengan tujuan menerapkan nilai nilai demokrasi pada pendidikan kewarganegaraan.

Penting untuk memperbarui dan menyalakan kembali kesadaran politik guna mewujudkan demokrasi yang sejati. Mahasiswa perlu memperluas wawasan politik mereka, sehingga pendapat masyarakat terkait proses politik tidak diterima begitu saja. Satu suara dalam pemilu sangat berpengaruh terhadap arah bangsa. Memang, memilih bukanlah hal yang mudah, tetapi tidak memilih juga bukan pilihan yang bijak. Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memberikan dasar bagi mahasiswa untuk berpikir kritis dan berani berpendapat ketika melihat ketidaksesuaian dalam sistem sosial maupun pemerintahan. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, mahasiswa diberikan pemahaman akan peran politik mereka. Partisipasi dan kesadaran mahasiswa akan pentingnya politik seharusnya didasari oleh keinginan mencapai tujuan bersama.

Oleh sebab itu, mahasiswa di Indonesia perlu mulai aktif berpolitik, baik dengan berpartisipasi dalam pemilu maupun menyampaikan aspirasinya, selaras dengan norma dan nilai yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Nilai-nilai tersebut meliputi Religiusitas, Kejujuran, Kecerdasan, Ketangguhan, Kepedulian, Demokratis, Nasionalisme, Ketaatan pada aturan sosial, Penghargaan terhadap keberagaman, serta Kesadaran akan hak dan kewajiban diri sendiri serta orang lain. Dengan demikian, demokrasi yang berkualitas dapat terwujud, sehingga menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, N. (2024). Peran Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi Bagi Mahasiswa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(10), 343-352.
- Tunggal, S. (2023). Membangun Kesadaran Politik Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 11-15.
- Ramadhan, D. E., Saputra, A. D., & Hamid, S. A. H. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Partisipasi Politik Remaja. *HUMANIORUM*, 2(2), 1-7.
- Sidabutar, P., & Tarigan, A. C. V. (2023). The Role of Civic Education in Building Political Awareness of Generation Z Young People Sri Yunita, Yeremia Afrianto Manalu1, Yuni Naftali Naibaho2, Marsella.
- Hidayati, E., Eddison, A., & Arianto, J. (2022). Pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk literasi politik mahasiswa (studi kasus mahasiswa

- PPKn FKIP Universitas Riau Angkatan 2018-2019). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10959-10966.
- Mufidah, N. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi Dalam Mewujudkan Smart And Good Citizen. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(2), 259-269.
- Hooghe, M., & Dassonneville, R. (2011). The effects of civic education on political knowledge. A two year panel survey among Belgian adolescents. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 23, 321-339.
- Alvira, S., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda sebagai agent of change. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9201-9207.
- Ismail, A. W., Dewandaru, W., Hidayat, D. R., & Zahran, F. A. (2023). STUDI PUSTAKA: URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 386-392.
- Ali, I. (2021). Pembelajaran Kooperatif (Cooperativelearning) Dalam Pengajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Mubtadiin*, 7(01), 247-264.